



PERUBAHAN ATAS RENCANA STRATEGIS

**ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN
DAN SOSIAL
TAHUN 2011 -2016**



**ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN SOSIAL
KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2014**

KATA PENGANTAR

Atas rahmat dan karunia Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Perubahan Rencana Strategis Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2016 telah dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah merupakan salah satu dokumen perubahan perencanaan yang memuat isu strategis didalam menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemsyarakatan yang lebih efektif dan efisien pada lingkup Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2011-2016, maka sesuai dengan ketentuan pada Bab V pasal 15 dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Disamping itu pula Perubahan Renstra ini disebabkan oleh adanya perubahan Perda Organisasi Pemerintah Kabupaten Jember.

Perubahan Rencana Strategis Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2016 yang telah ditetapkan ini tentunya masih jauh dari sempurna sehingga bantuan berupa kritik dan saran dari semua pihak tentunya sangat kami harapkan untuk perbaikan-perbaikan program dan kegiatan dimasa yang akan datang, dan semoga Perubahan Renstra ini dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan khususnya pada lingkup Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.

Negara, Oktober 2014

Asisten Ekbangsosbud Sekretaris Daerah,

Drs. I Ketut Windra, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19561231 197903 1 123



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I	P E N D A H U L U A N	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
BAB II	GAMBARAN LAYANAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana	10
	2.2 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan, Strategi dan Analisis Swot	13
	2.3 Sumber Daya Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupataen Jembrana	16
	2.4 Tantangan dan Peluang pelayanan pada Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana	18
	2.4.1 Tantangan	18
	2.4.2 Peluang	18
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	3.1 Identifikasi Permasalahan	20
	3.2 Telaahan Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	21
	3.3 Isu-isu Strategis	22
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN	
	4.1 Visi dan Misi Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana	24
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kab.Jembrana	26
	4.3 Strategi dan Kebijakan Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana	30
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
	5.1 Program dan Kegiatan Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana	31
	5.2 Pagu Indikatif Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana	34



Daftar Isi

BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN	
	6.1 Indikator Kinerja	37
	6.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja	37
	6.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci	37
BAB VII	P E N U T U P	44



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Startegis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Perencanaan Strategis Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan lima tahunan. Perencanaan Srategis Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana disusun sebagai wujud komitmen jajaran Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Fungsi Renstra Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana adalah sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna



meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Asisten Ekbangso Sekretaris Daerah Kabupaten Jember melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkann visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Asisten Ekbangso Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, visi dan misi Kabupaten Jember. **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritas dari Sekretaris Daerah, sedangkan program dann kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dokumen Renstra Asisten Ekbangso Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember 2011-2016.

Sehubungan dengan adanya pencabutan terhadap dasar hukum penyusunan Renstra Sekda 2011-2016 yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 pada pada



Pemerintah Kabupaten Jemberana juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Renstra Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah



diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana
- Peraturan Bupati Jembrana Nomor Nomor 46 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Revisi Renstra Asisten Ekbangsosbud Sekretaris Daerah



Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2016 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten pada lingkup Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2016. Setelah terlaksana beberapa bulan, Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kabupaten Jember di evaluasi maka hal ini berpengaruh pula pada Renstra sebelumnya.

Revisi Renstra Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2016 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jember yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Penyusunan Revisi Renstra Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2016 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif pada lingkup Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah sesuai dengan perubahan Peraturan Daerah dimaksud selama lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam tahun-tahun kedepan, untuk menyusun :

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretaris Daerah .
3. Sebagai sumber hukum dalam perencanaan, penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun .
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4 SISTEMATIKA RENSTRA ASISTEN EKBANGSOS SEKRETARIS DAERAH

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematiكا Perencanaan Strategis (Renstra) Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2016 terdiri atas:



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas: Mengemukakan secara ringkas : Pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra SKPD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD,

Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ASISTEN EKBANGSOS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan



SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

Kinerja SKPD memuat; tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRTEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Sekretaris Daerah . Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Jemberana 2011-2016. Misi disusun untuk menjabrakan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA ASISTEN EKBANGSOS SEKRETARIS DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indicator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran,Pada bagian dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.



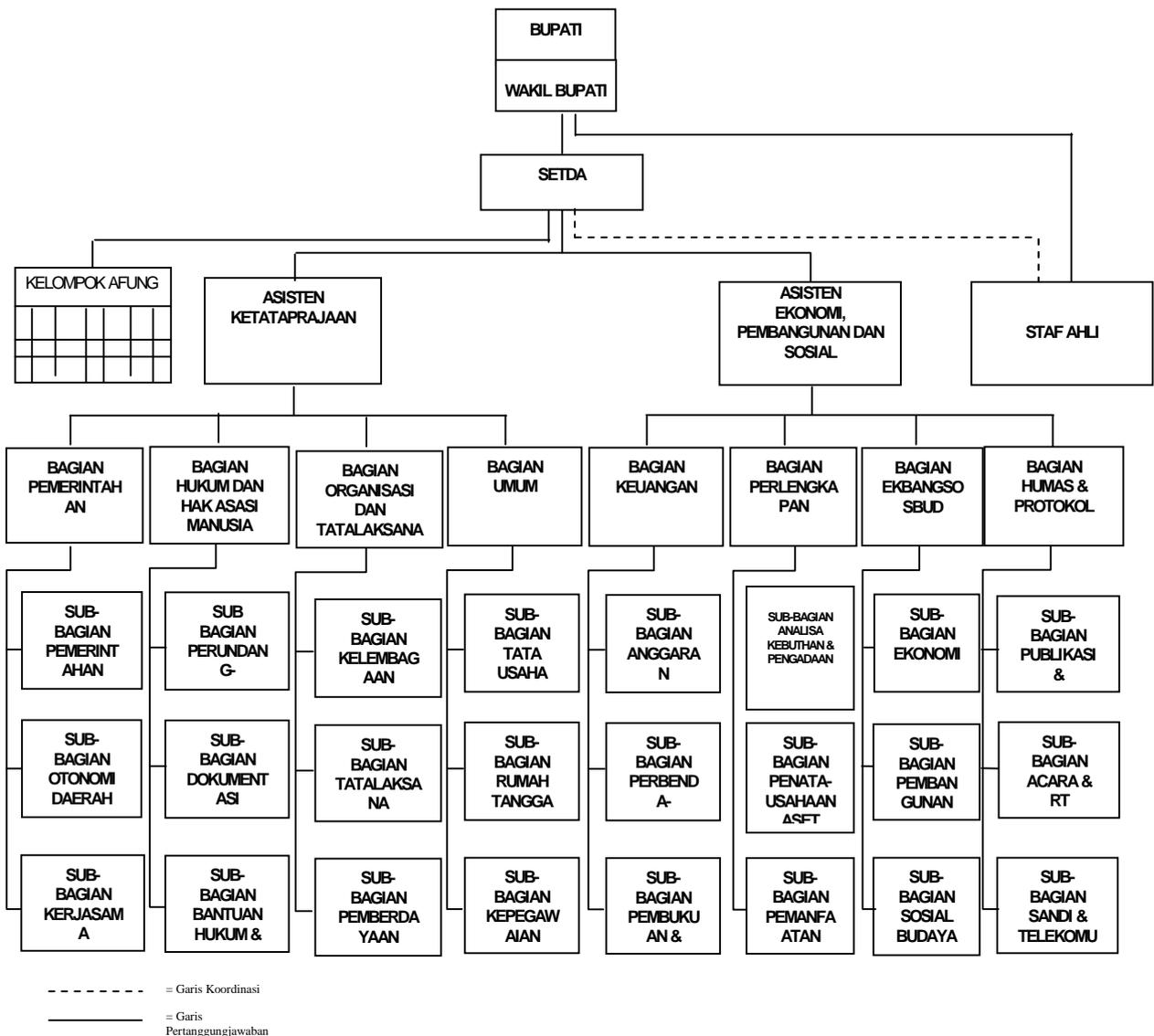
BAB II

GAMBARAN LAYANAN ASISTEN EKBANGSOS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan Perda Nomor 15 tahun 2011, Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah membawahi dua asisten dan 8 (Delapan) bagian, dengan bagan struktur sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



Berdasarkan Perda 15/2011



Dari bagan struktur organisasi diatas dapat dilihat bahwa Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial, membawahi 4 (empat) bagian yaitu;

1. Bagian Keuangan;
2. Bagian Perlengkapan;
3. Bagian Ekbangsosbud; dan
4. Bagian Humas dan Protokol.

Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang merupakan pejabat eselon III-a dan membawahi 3 (tiga) sub-bagian yang merupakan pejabat eselon IV-a. Jadi jumlah pejabat struktural pada Asisten Ekbangsosbud Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Jemberana adalah sebanyak 17 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II-b, 4 (empat) orang eselon III-a (Kepala Bagian) dan 12 (dua belas) orang pejabat eselon IV-a (Kepala Sub Bagian).

a. Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jemberana, bahwa Tugas Pokok dan fungsi Asisten Ekbangsos Sekretariat Daerah Kabupaten Jemberana, sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial Kabupaten Jemberana adalah membantu sebagian tugas sekda dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah, mengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta membina administrasi keuangan dan aset daerah.



2. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut diatas, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan sekretariat daerah yang membidangi; kesehatan, kesejahteraan sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, agama, budaya, pariwisata, koperasi, UMKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, informatika, komunikasi, badan usaha daerah, keuangan, pendapatan, perlengkapan, aset, kearsipan/data elektronik dan data non elektronik, serta perpustakaan;
 - c. pemantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - d. pembinaan Administari keuangan dan Asset daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Asisten Ekbangsos, dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;
 - c. mengkoordinasikan para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung, meliputi bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, agama, budaya, pariwisata, koperasi, UMKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, informatika, komunikasi, badan usaha daerah, keuangan,



- pendapatan, perlengkapan, aset, kearsipan/data elektronik dan data non elektronik, serta perpustakaan;
- d. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan aset kepada seluruh perangkat daerah;
 - e. memberi petunjuk kepada para Kepala Bagian untuk mengadakan koordinasi dengan Unit Kerja / Instansi lain sesuai bidang tugasnya dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan rencana;
 - f. menilai prestasi kerja Kepala Bagian dan bawahan dengan cara mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
 - g. memberi saran dan masukan kepada Sekda di bidang Perekonomian, Pembangunan, Sosial budaya, Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - h. membantu sebagian tugas Sekda di bidang Perekonomian, Pembangunan, Sosial budaya, Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kedinasan kepada Sekda.

2.2 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan, Strategi dan Analisis Swot

Faktor-faktor kunci keberhasilan (FKK) berfungsi untuk memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran visi dan misi secara efektif dan efisien. Untuk memperoleh Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) dan Analisis Strategi Pilihan (ASP) digunakan metode Analisa SWOT, sebagai berikut :

- Strategi SO dengan cara menggunakan kekuatan (S) untuk memanfaatkan peluang (O)
- Strategi WO dengan cara mengurangi kelemahan (W) dengan memanfaatkan peluang (O)



- Strategi ST dengan cara menggunakan kekuatan (S) untuk mencegah ancaman (T)
- Strategi WT dengan cara mengurangi kelemahan (W) dengan mencegah ancaman (T)

Untuk mengetahui Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) maka terlebih dahulu dilakukan analisis lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

A. Analisis Lingkungan Internal (ALI) dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan intern Sekretaris Daerah Kabupaten Jember meliputi kekuatan dan kelemahan.

a. Kekuatan/Strength (S)

- Adanya Struktur Organisasi yang dituangkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2011, merupakan landasan yang kuat didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- Adanya pengalokasian dana APBD Kabupaten Jember yang diporsikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jember merupakan kekuatan sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, karena tanpa adanya dukungan dana mustahil kegiatan dapat dilaksanakan.

b. Kelemahan/Weaknesses (W)

- SOP yang belum dilaksanakan secara berkesinambungan membuat tingkat pelayanan publik belum optimal



- Terbatasnya kualitas SDM, sarana dan prasarana yang tersedia pada Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, hal ini dapat mempersulit pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah secara optimal.
- B. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah dengan mencermati diluar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan tantangan.
- a. Peluang/Opportunities (O)
- Adanya kebijakan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik.
 - Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja, merupakan pedoman yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan paratur yang profesional.
- b. Ancaman /Treants (T)
- Rendahnya capaian kinerja instansi pemerintah bagi SKPD menunjukkan budaya kerja aparatur belum produktif, profesional dan bertanggungjawab.
 - Belum adanya pengawasan melekat sebagai akibat dari rendahnya budaya disiplin dan budaya tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam rangka penciptaan penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember



tahun 2011-2016 adalah perwujudan dari amanat UU. No. 28 tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terutama terhadap peningkatan kualitas layanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

2.3. Sumber Daya Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana.

JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR PADA ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN, DAN SOSIAL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

No	UNIT KERJA	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1	Bagian Keuangan	8	16	24
2	Bagian Humas dan Protokol	15	16	31
3	Bagian Perlengkapan	29	5	34
4	Bagian Ekbangsosbud	9	4	13
JUMLAH		61	41	102

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1	SD	1		1
2	SMP	3		3
3	SMA	24	24	48
4	D I	-	-	
5	D II	2		2
6	D III	3	2	5
7	D IV	0	0	
8	Sarjana (S1)	22	14	36
9	Pasca Sarjana (S2)	6	1	7
JUMLAH		61	41	102



**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT GOLONGAN**

No	JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1	Golongan I	4		4
2	Golongan II	22	24	46
3	Golongan III	30	17	47
4	Golongan IV	5	-	5
JUMLAH		61	41	102

**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT TINGKAT GOLONGAN/RUANG**

No	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1	I/a	1		1
2	I/b			
3	I/c	1		1
4	I/d	2		2
5	II/a	4	7	11
6	II/b	13	15	28
7	II/c	2	1	3
8	II/d	3	1	4
9	III/a	12	10	22
10	III/b	11	7	18
11	III/c	6		6
12	III/d	1		1
13	IV/a	5		5
14	IV/b			
15	IV/c			
16	IV/d			
JUMLAH		61	41	102

Berdasarkan data bulan Desember 2012 tersebut diatas jumlah pegawai yang ada di lingkungan Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Sekda. Kabupaten Jember adalah 102. orang, dengan sebaran sebagai berikut: di Bagian Ekbangsosbud sebanyak 13 orang, di Bagian Perlengkapan sebanyak 34orang, di Bagian Keuangan sebanyak orang, di Bagian Humas dan Protokol sebanyak 31 orang.



2.4 Tantangan dan Peluang pelayanan pada Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.

2.4.1 Tantangan

- a. Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur);
- b. Komitmen pengembangan dan peningkatan kualitas SDM berupa anggaran belum sesuai (dibawah standar) dengan ketentuan SE. MENDAGRI. Dengan diindikasikan dengan terbatasnya kuantitas pengiriman dan penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional;
- c. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan Diklat di Daerah;
- d. Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur;
- e. Semakin kritisnya pola pikir masyarakat;
- f. Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di daerah lain;
- g. Globalisasi (transparansi, akuntabel pengelolaan SDM).

2.4.2 Peluang

- a. Keputusan. MENPAN Nomor Kep/23.2/M.PAN/2/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Keputusan Kepala BKN No 46 A tentang Standar kompetensi Jabatan Struktural dan No 46 B tentang Evaluasi Jabatan;
- c. Tuntutan tentang Standar pelayanan minimal (SPM) dalam Pelayanan Kepegawaian;
- d. Kebijakan kepegawaian secara nasional yang mensyaratkan diklat sebagai bagian sistem pembinaan pegawai;



- e. Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan lokal maupun nasional yang bisa diajak kerjasama diindikasikan dengan Kerjasama penyelenggaraan Diklat dengan sistem pola kemitraan;
- f. Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (pensiun, askes, dll);
- g. Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal);
- h. Makin banyaknya lembaga pengawasan formal dan non formal.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (Good Governance), selain didukung tatanan pemerintahan yang sistematis dan terorganisir dengan prasarana dan sarana yang didukung oleh sumber daya profesional, juga diperlukan tingkat disiplin dan budaya kerja dari aparatur pemerintah didalam melaksanakan pelayanan public.

Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan yang mempengaruhi perencanaan strategis Sekretaris Daerah Kabupten Jembrana sebagai berikut:

1. Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan.

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola pemerintahan oleh penyelenggara negara pada umumnya merupakan tantangan yang perlu dijawab melalui perbaikan dan peningkatan kualitas aparatur, meliputi aspek kelembagaan,
- b. Belum adanya pengawasan melekat bagi aparatur pemerintah sebagai akibat dari rendahnya budaya disiplin dan budaya tertib kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
- c. Rendahnya capaian kinerja instansi pemerintah bagi SKPD menunjukkan budaya kerja aparatur belum produktif, profesional dan bertanggungjawab untuk melaksanakan SOP.
- d. Minusnya sumber daya alam ataupun potensi yang dimiliki pemerintah daerah serta terbatasnya sumber daya manusia berkualitas sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap DAU dari pemerintah pusat sangat tinggi

2. Permasalahan Kelembagaan

- a. Perkembangan kehidupan demokrasi dan pemahaman politik masyarakat yang semakin matang mengharuskan pemerintahan daerah dengan segala kelemahan perangkat birokrasinya untuk senantiasa dapat menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat sehingga tetap

memperoleh kepercayaan publik. Untuk itu perangkat daerah sebagai pelaksana kebijakan daerah secara kelembagaan haruslah dapat memenuhi seluruh harapan-harapan masyarakat, sedangkan disisi lain kelembagaan/struktur organisasi yang dibentuk belum tentu mengcover seluruh penyelenggaraan urusan yang seharusnya dilaksanakan.

- b. Perubahan struktur organisasi yang kerap terjadi secara tidak langsung menyebabkan tatanan yang sudah berjalan mengalami perlambatan, dan tidak jarang di beberapa bidang ada yang harus dimulai dari awal lagi.

3. Permasalahan Hukum

Dengan pesatnya perubahan Peraturan Perundang-undangan di tingkat Pusat menyebabkan peraturan daerah yang telah disusun harus mengalami perubahan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Disamping hal tersebut pemerintah daerah dituntut untuk melakukan sosialisasi dan penerapan yang cepat sesuai amanat maka diperlukan SDM, sarana prasarana yang mendukungnya. .

4. Permasalahan Penyediaan Sarana Kebutuhan Rumah Tangga Keseekretariatan

Keterbatasan anggaran atau kemampuan keuangan daerah yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan organisasi dan sering adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

3.2 Telaahan Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah

Visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, KEWIRAUSAHAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”

Menyimak visi yang ditetapkan tersebut terdapat 3 (tiga) Kata Kunci yang tertuang dalam Visi Bupati Antara lain:

1. Terwujudnya Ketertiban Masyarakat
2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia
3. Dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Visi misi diatas merupakan visi dan misi yang akan dituangkan didalam RPJMD Kabupaten Jembrana, sehubungan dengan hal tersebut untuk menelaah ataupun menggali arti visi misi tersebut, maka SKPD khususnya Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana memiliki visi dan misi yang akan memberikan kontribusi bagi momentum kebangkitan tatanan aparatur pemerintahan di Kabupaten Jembrana dengan Mengacu pada Visi Bupati Jembrana dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah yang membidangi masalah-masalah Pemerintahan, Hukum dan HAM, Organisasi Tatalaksana dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana secara profesional. Dengan demikian maka visi yang dituangkan Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan dengan didukung aparatur yang profesional, dilandasi semangat kebersamaan serta senantiasa mengutamakan pelayanan menuju masyarakat Jembrana yang Sejahtera”.

Dari Visi Sekretaris Daerah, Asisten Ekbangsos yang merupakan salah satu Asisten dibawahnya menetapkan visi, sebagai berikut ;

”Terwujudnya pelayanan tertib administrasi bidang keuangan, ekbangsosbud, humas protokol, perlengkapan, dan penyediaan sarana dan prasarana, dengan dilandasi semangat kebersamaan”.

3.3. Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu komponen yang akan memberikan stimulus terhadap pembangunan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Jembrana guna memberikan pelayanan aparatur dan pelayan

public yang berkualitas bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi isu strategis Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang sekaligus pula menjadi isu strategi Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah, sebagai berikut:

1. Penelaahan kembali struktur organisasi, penataan tatalaksana pemerintah daerah melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); penerapan penilaian kinerja pegawai; serta pembangunan *e-office* dan *e-government* (seperti *e-procurement* dan *e-audit*).
2. Perbaikan system birokrasi pemeritahan terkait dengan peningkatan kualitas peyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pemerataan tingkat kompetensi atau kualitas dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah; serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan PNS daerah, meliputi: sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS.
4. Peningkatan disiplin aparatur pemeritah yang cenderung masih rendah.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana.

Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Kabupaten Jemberana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen Pemerintah Kabupaten beserta rakyat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana dapat menyusun visi yang merupakan break down dari visi sekda

1. Visi

Visi Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana adalah :

“Terwujudnya pelayanan tertib administrasi bidang keuangan, ekbangsosbud, humas protokol, perlengkapan, dan penyediaan sarana dan prasarana, dengan dilandasi semangat kebersamaan”.

Penjelasan Visi :

Pelayanan tertib administrasi merupakan kegiatan administrasi dibidang keuangan, ekbangsosbud, humas protokol, perlengkapan dan penyediaan sarana dan prasarana, dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

2. MISI

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran



instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Misi Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah dirumuskan dengan tetap memperhatikan misi Asisten Ekbangsos Kabupaten Jemberana sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekda Kabupaten Jemberana. Oleh karena itu Misi Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan protokoler, koordinasi, sandi dan telekomunikasi serta kehumasan yang mantap dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan umat beragama dan monitoring, evaluasi bidang ekonomi, pembangunan dan sosial budaya.
3. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dan
4. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah.

Penjelasan masing-masing misi dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi Kesatu : Mewujudkan pelayanan protokoler, koordinasi, sandi dan telekomunikasi serta kehumasan yang mantap dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Pelayanan Protokoler bagi kepala/wakil kepala daerah dan bagi tamu-tamu pemerintah kabupaten serta pelaksanaan acara resmi mutlak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, memfasilitasi rapat Koordinasi antar Instansi maupun Unit Kerja harus senantiasa dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Penyampaian informasi mengenai acara Bupati/wakil Bupati dan pencapaian pembangunan serta informasi lainnya yang dipentingkan oleh masyarakat secara rutin sehingga pencapaian pemerintah dapat diketahui secara luas. Sehubungan dengan pelayanan Sandi dan telekomunikasi dalam hal surat kawat dan feximaile serta kerahasiaannya merupakan tugas yang memerlukan SDM yang terlatih dalam menterjemahkan sandi yang dikirim oleh pemerintah atasan.



Misi kedua : Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan umat beragama dan monitoring, evaluasi bidang ekonomi, pembangunan dan sosial budaya;

Penduduk Kabupaten Jember dilihat berdasarkan agama yang dianut dapat dikatakan sangat heterogen dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Bali, untuk itulah perlu dilakukan program dan kegiatan pemerintah untuk dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan umat beragama. Program dana hibah dan bansos yang digelontorkan pada masyarakat merupakan salah satu langkah peningkatan keimanan, ketakwaan dan kerukunan umat beragama, haruslah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya agar adanya transparansi realisasi anggaran dimaksud.

Misi Ketiga : Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

Pengelolaan keuangan daerah haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada serta dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Demikian pula harus terbuka kepada publik sebagai mekanisme kontrol terhadap pengelolaan keuangan dan meminimalisir penyelewengan.

Misi keempat : Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pengelolaan dan penatausahaan barang daerah haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada serta dapat dikelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jember .

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Meneg PAN



menyatakan: “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ (Meneg. PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Asisten Ekbangsos Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dipaparkan per- Bagian dengan pertimbangan lebih memudahkan dalam perencanaan dan evaluasi. Adapun Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut:

TUJUAN

No	Misi	Tujuan
II	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial	
1	Bagian Humas dan Protokol	
a	Mewujudkan pelayanan protokoler, koordinasi, sandi dan telekomunikasi serta kehumasan yang mantap dalam rangka suksesnya	1. Meningkatnya pelayanan protokoler, koordinasi, sandi dan telekomunikasi serta kehumasan yang mantap dalam rangka suksesnya penyelenggaraan



No	Misi	Tujuan
	penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2.	Bagian Ekbang Sos Bud.	
a	Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan umat beragama dan monitoring, evaluasi pelaksanaan bidang ekonomi, pembangunan dan sosial budaya.	2. Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan kerukunan umat beragama dan monitoring, evaluasi pelaksanaan bidang ekonomi, pembangunan dan sosial budaya.
3.	Bagian Keuangan	
a	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	3. Meningkatnya efektifitas sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah 4. Meningkatnya efisiensi sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah
4.	Bagian Perlengkapan	
a	Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah.	5. Meningkatnya sistem pengelolaan barang milik daerah 6. Meningkatnya penatausahaan barang milik daerah

SASARAN

No	Tujuan	Sasaran
II	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial	
1	Bagian Humas dan Protokol	
a	Meningkatnya pelayanan protokoler, koordinasi, sandi dan telekomunikasi serta kehumasan yang mantap dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1. meningkatnya koordinasi dengan pemerintah lainnya 2. meningkatnya fasilitas sewa rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah. 3. meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. meningkatnya disiplin dan aparatur dan Pembinaan dan pengembangan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.



No	Tujuan	Sasaran
2.	Bagian Ekbang Sos Bud.	
a.	Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan kerukunan umat beragama dan monitoring, evaluasi pelaksanaan bidang ekonomi, pembangunan dan sosial budaya.	1. Terlaksananya kewajiban Pemkab Jemberana dalam melaksanakan upacara, upacara dan banten keagamaan serta pemeliharaan sarana prasarana pura didalam Kabupaten Jemberana maupaun diluar Kabupaten Jemberana. 2. Terlaksananya pengiriman Sulinggih, pemangku, serta Tukang Banten untuk mengikuti pelatihan. 3. Terlaksananya monitoring, evaluasi pelaksanaan bidang ekonomi, pembangunan serta sosial budaya.
3.	Bagian Keuangan	
a.	Meningkatkan efektifitas sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya Efektifitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
b.	Meningkatkan efisiensi sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya Efisiensi Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
4.	Bagian Perlengkapan	
a.	Meningkatkan sistem pengelolaan barang milik daerah	Terwujudnya Sistem Pengelolaan Barang Daerah
b.	Meningkatkan penatausahaan barang milik daerah	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah

4.3 Strategi dan Kebijakan Asisten Ekbangsosbud Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau sasaran. Cara atau langkah ini dirumuskan secara konseptual analitis dan rasional. Strategi bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan berisikan kebijakan dan program dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.



Kebijakan Yang diambil pada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan keimanan, ketaqwaan serta kerukunan umat beragama
2. Meningkatkan monitoring bidang ekonomi, pembangunan dan sosial budaya.
3. Meningkatkan efektifitas sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah
4. Meningkatkan sistem pengelolaan barang daerah
5. Meningkatkan penatausahaan barang milik daerah.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Perda Kelembagaan Nomor 15 Tahun 2011, tugas dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dijabarkan dalam Program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang mengacu pada :

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.
2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Rencana program dan kegiatan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dijabarkan per-masing-masing Asisten, guna memudahkan untuk melakukan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Adapun Rencana program dan kegiatan pada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial sebagai berikut :

5.1 Program dan Kegiatan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial Sekretaris Daerah Kabupaten Jember

- A. Bagian Ekonomi Pembangunan Sosial dan Budaya, dengan Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :
 1. Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan :
 - a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Bercorak Kesenian dan Kebudayaan.
 2. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah :



- a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan bantuan Pemkab dan pengelolaan keuangan daerah lainnya
 - b. Pengendalian Inflasi Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- a. Penyusunan Kegiatan tentang Study Kelayakan Perusahaan Daerah (Perusda).
 - b. Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran.
- B. Bagian Keuangan, dengan Program dan Kegiatan :
1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - d. Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - f. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - g. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - h. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD
 - i. Pembinaan penatausahaan keuangan daerah;
 - j. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
 - k. Pengelolaan gaji PNSD;
- C. Bagian Perlengkapan, dengan Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;



2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - b. Pengadaan mebeleur.
 - c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
 - f. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - g. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas.
 - h. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 3. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
 - a. Penyusunan Standard Satuan Harga
 - b. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah.
 - c. Kegiatan Revaluasi/apraisal aset/Barang Daerah
 - d. Kegiatan Otimalisasi Informasi terhadap Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- D. Bagian Humuas dan Protokol, dengan kegiatan :
1. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya
 - b. Dialog/ Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan
 - c. Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
 - d. Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas
 - e. Penyediaan Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
 - f. Koordinasi peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



- g. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- 2. Program Kerjasama informasi dan media masa, dengan kegiatan :
 - a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan.
- 3. Program Peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- 4. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan dan pengembangan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.

5.2. Pagu Indikatif Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana

Pagu indikatif penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana dijabarkan per masing-masing Asisten, untuk mempermudah dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Adapun pagu indikatif pada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial sebagaimana tabel berikut :

PERENCANAAN KEGIATAN		INDIKATIF ANGGARAN (Rp. 000.000,00)					
		TAHUN (Termasuk Pemeliharaan Tahun 2016)					
I.	Asisten Ekbangsos						
A	Bagian Ekbangsosbud	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1. Program pengembangan nilai budaya, dengan kegiatan :						
	a Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		777	815,85	856,643	1,198,280	2,251,500
	b Pengadaan sarana dan prasarana bercorak kesenian dan kebudayaan		21,525	22,6013	23,7313	395,706,623	395,706,623
	2 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan :						
	a Monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan bantuan pemkab dan pengelolaan keuangan daerah lainnya;		112,438	118,060	123,963	226,380,275	226,380,275
	b Pengendalian Inflasi Daerah					103,180	125,550
	3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :						
	a Penyusunan Kajian tentang Study Kelayakan Perusahaan Daerah (Perusda).					150	101,300
	b Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran			110,700	231,639	222,490	231,640



Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

B	Bagian Keuangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan :						
a.	Penyusunan Kejjakan Akuntansi Pemerintah Daerah.	-	74,160	-	-	-	-
b.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;	83,28 2	115,852	123,842	94,167	116,403	128,042
c.	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	86,28 2	132,590	119,208	128,919	148,009	162,810
d.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	83,28 2	220,172	244,772	325,575	275,251	302,776
e.	Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	98,69 0	172,943	138,722	142,790	168,213	185,034
f.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	133,3 12	124,874	105,145	125,560	140,050	154,055
g.	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	105,7 46	109,043	136,072	115,623	108,279	119,106
h.	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMAKDA)	175,0 00	175,000	100,000	109,443	163,397	179,736
i.	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD (SIADINDA)	296,0 00	350,000	350,000	339,037	324,500	356,950
j.	Pembinaan penatausahaan keuangan daerah	452,0 80	568,049	613,320	661,578	665,998	735,898
k.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;	-	83,454	130,891	121,245	113,643	125,007
l.	Pengelolaan gaji PNSD	-	76,378	104,253	104,253	104,253	114,678
C.	Bagian Perlengkapan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :						
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		7,624,260	8,005,473	8,405,747	8,826,034	9,267,335
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, dengan kegiatan :						
a.	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional		1,055	1,107,750	1,163,138	1,221,294	1,282,359
b.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		618,040	648,942	519,154	415,323	498,387
c.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		18,171	19,079	20,033	21,035	22,086
d.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		578,728	607,664	638,048	669,950	703,447
e.	Pengadaan meubeler		329,169	345,627	362,908	381,054	400,107
f.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		737,755	774,642	813,375	854,043	896,745
g.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor		545,000	572,250	600,862	630,905	662,451
h.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		88,000	92,400	97,020	101,871	106,964
3.	Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan:						
a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		267,200	280,560	294,588	309,317	324,783
4.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan						



Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

	keuangan						
	a. Penyusunan standard satuan harga		34,671	36,404	38,225	40,136	42,143
	b. Peningkatan manajemen aset/barang daerah		1,090,349	1,144,866	1,202,110	1,262,215	1,325,326
	c. Revaluasi/apraisal aset/Barang Daerah				327,314	341,135	507,3098
	d. Kegiatan Optimalisasi Informasi terhadap Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)					325,9415	318,558
D	Bagian Humas dan Protokol	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan kegiatan :						
	a. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya		100,000	105,000	110,250	115,762	121,550
	b. Dialog/ Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan		335,688	352,472	370,096	388,600	408,031
	c. Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri		78,412	82,332	86,449	90,772	95,310
	d. Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas		324,000	340,200	357,210	375,071	393,824
	e. Penyediaan Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		1,069,750	1,123,237	1,179,399	1,238,369	1,300,288
	f. Koordinasi peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		55,000	57,750	60,637	63,669	66,853
	g. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		32,000	33,600	35,280	37,044	38,896
	2. Program Kerjasama informasi dan media masa, dengan kegiatan :						
	a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan		564,348	592,565	622,194	653,303	685,968
	3. Program Peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan :						
	a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		619,397	650,367	682,885	717,029	752,881
	4. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, , dengan kegiatan :						
	a. Pembinaan dan pengembangan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi				150,000	99,9632	107,4932



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

6.1 Indikator Kinerja

6.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas : Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di



pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

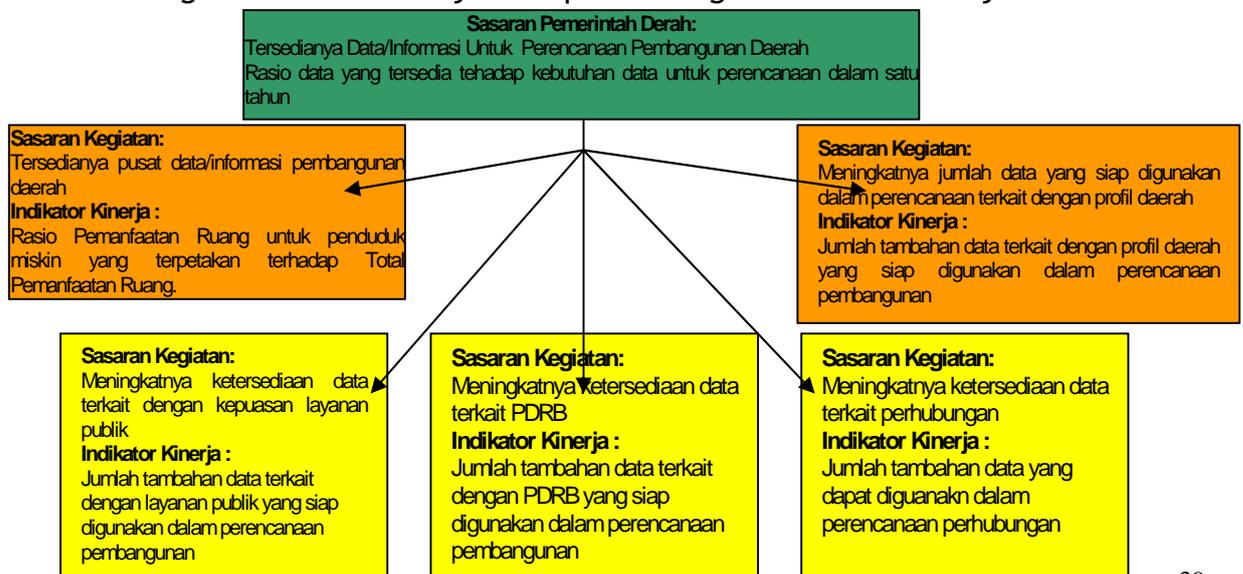


PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Hubungan Indikator Kinerja Kabupaten dengan Indikator Kinerja SKPD.





**Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Asisten Ekbangsos Sekretairs Daerah Kabupaten Jemberana**

(disajikan per-Bagian)

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan
II. Asisten Ekbangsos		
1. Bagian Ekbangsosbud		
Tertindakannya kewajiban Pemkab Jemberana dalam mengatur upacara penganyar ke pura-pura yang didalam maupaun diluar kabupaten.	Jumlah Pura yang dilaksanakan upacara penganyar.	Pura
Tertindakannya pengiriman sulinggih, Pemangku, Tukang Banten serta Calon Instruktur Pasraman untuk mengikuti pelatihan.	Jumlah Sulinggih, Pemangku, Tukang Banten serta Calon Instruktur Pasraman yang dikirim untuk mengikuti pelatihan.	Orang
Tertindakannya monitoring dan evaluasi pada bidang Ekonomi, Pembangunan serta Sosial Budaya di Kabupaten Jemberana	Jumlah Tim pemantauan dan evaluasi Ekonomi, Pembangunan serta Sosial Budaya di Kabupaten Jemberana.	Laporan / Buku
2. Bagian Keuangan		
Tertwujudnya efektifitas sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perda APBD - Jumlah Perda Perubahan APBD - Jumlah Perbup Penjabaran APBD - Jumlah Perbup Penjabaran Perubahan APBD - Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD - Jumlah Pebup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 	<ul style="list-style-type: none"> Perda Perda Perbub Perbub Buku Perbub/Buku



Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

<p>Terwujudnya efisiensi sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemeliharaan Jaringan Sistem Keuangan di Bagian Keuangan - Jumlah pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD - Jumlah pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah - Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran - Jumlah anggaran Pembayaran Gaji PNSD 	<p>Jaringan</p> <p>Jaringan</p> <p>Persen (%)</p> <p>Buku</p> <p>Persen (%)</p>
<p>3. Bagian Perlengkapan</p>		
<p>Terwujudnya Sistem Pengelolaan Barang Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terbayarnya jasa air, listrik, dan sarana komunikasi (telepon) - Tersedianya Peralatan Gedung Kantor - Tersedianya Kebutuhan Meubeleur - Tersedianya bahan dan jasa pemeliharaan gedung kantor - Tersedianya jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Tersedianya suku cadang dan jasa service - Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 	<p>bulan</p> <p>jenis</p> <p>jenis</p> <p>bulan</p> <p>bulan</p> <p>bulan</p> <p>bulan</p> <p>jenis</p>
<p>Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Buku Pedoman Standarisasi Satuan Harga atas Pengadaan Baran 	<p>buku</p>



Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya tertib Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah pada SKPD dan Unit SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana. - Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah - Terlaksananya Pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) 	<p>sistem</p> <p>bulan</p> <p>sistem</p>
4. Bagian Humas dan Protokol		
meningkatnya koordinasi dengan pemerintah lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota ormas - meningkatnya koordinasi dengan pemerintah Pusat dan pemerintah lainnya - meningkatnya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri - meningkatnya koordinasi peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 	<p>Persen (%)</p> <p>Persen (%)</p> <p>Persen (%)</p> <p>Persen (%)</p>
meningkatnya fasilitas sewa rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya fasilitas sewa rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah. - meningkatnya penyediaan keperluan rumah tangga kepala 	<p>Persen (%)</p> <p>Persen (%)</p>



Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

<p>meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	<p>daerah/wakil kepala daerah</p> <p>- meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Persen (%)</p>
<p>meningkatnya disiplin dan aparatur dan Pembinaan dan pengembangan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.</p>	<p>- meningkatnya Pembinaan dan pengembangan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.</p>	<p>Persen (%)</p>
	<p>- meningkatnya penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah</p>	<p>Persen (%)</p>
	<p>- meningkatnya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p>	<p>Persen (%)</p>

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Asisten Ekbangsospud Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Jember akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud, dilaporkan per-masing-masing Asisten yang didukung dengan capaian kinerja dari masing-masing Bagian dibawahnya.

Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on - going*) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (*ex - post*).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.



BAB VII P E N U T U P

Revisi Rencana Strategis Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2016 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Sekretaris Daerah Kabupaten Jember yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Daerah Kabupaten Jember, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Revisi Rencana Strategis Sekretaris Daerah Kabupaten Jember ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

**Asisten Ekbangsos Sekretaris
Daerah Kabupaten Jember,**

**Drs. I Ketut Windra, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19561231 197903 1 123**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		TARGET	Rp		
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2		Jumlah Perda APBD	1.20.1.20.03.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Output: Perda tentang APBD Kabupaten Jembrana Outcome: Terpenuhiya Perda tentang APBD Kabupaten Jembrana		1 perda	83.282	1 perda, 100 buku	115.852	1 perda	123.842	1 perda	94.167	1 perda	116.403	1 perda	128.042				
		Jumlah Perbup Penjabaran APBD	1.20.1.20.03.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Output: Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Outcome: Terpenuhiya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		1 perbup	193.995	1 perbup, 100 buku	132.590	1 perbup	119.208	1 perbup	128.919	1 perbup	148.009	1 perbup	162.810				
		Jumlah Perda Perubahan APBD	1.20.1.20.03.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Output: Perda tentang Perubahan APBD Outcome: Terpenuhiya Perda tentang Perubahan APBD		1 perda	116.932	1 perda, 100 buku	220.172	1 perda, 100 buku	244.772	1 perda	325.575	1 perda	275.251	1 perda	302.776				
		Jumlah Perbup Penjabaran Perubahan APBD	1.20.1.20.03.17.09	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Output: Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD		1 perbup	98.690	1 perbup, 100 buku	172.943	1 perbup, 100 buku	138.722	1 perbup	142.790	1 perbup	168.213	1 perbup	185.034				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6					
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp (000.000)		
							TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Outcome: Terpenuhinya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD																	
	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD	1.20.1.20.03.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Output: Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Outcome: Terpenuhinya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		100 buku	43.228	1 perda, 100 buku	124.874	1 perda, 100 buku	105.145	1 perda, 100 buku	125.560	1 perda, 100 buku	140.050	1 perda, 100 buku	154.055					
	Jumlah Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	1.20.1.20.03.17.11	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Output: Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Outcome: Terpenuhinya Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		100 buku	105.746	1 perbup, 100 buku	109.043	1 perbup, 100 buku	136.072	1 perbup, 100 buku	115.623	1 perda, 100 buku	108.279	1 perda, 100 buku	119.106					

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6					
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp (000.000)		
							TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Jumlah pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	1.20.1.20.03.18.06	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Output: Meningkatnya Pemahaman Bendaharawan dan Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome: Meningkatnya Kemampuan Bendaharawan dan Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	500.846	37 SKPD	568.049	40 SKPD	613.320	100%	661.578	100%	665.998	100%	735.898				
			1.20.1.20.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																		
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.20.1.20.03.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Output: Terkonsolidasinya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran masing-masing SKPD		-	0.000	100 buku	83.454	100 buku	130.891	100 buku	121.245	100 buku	113.643	100 buku	125.007				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB		
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp (000.000)		TARGET	Rp (000.000)
							TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)		TARGET	Rp (000.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					Outcome: Tercapainya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Semesteran Pemerintah Kabupaten Jembrana																		
			1.20.1.20.03.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah																			
		Jumlah anggaran Pembayaran Gaji PNSD	1.20.1.20.03.17.37	Pengelolaan Gaji PNSD	Output: Meningkatnya Pemahaman Penganggaran dan Pengelolaan Gaji PNSD Outcome: Terpenuhiya Ketersediaan Pendukung Dokumen APBD di bidang Pengelolaan Gaji		-	0.000	100%	76.378	37 SKPD	104.253	40 SKPD	104.253	100%	104.253	100%	114.678					
1	Terwujudnya Sistem Pengelolaan Barang Daerah		1.20.1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya layanan administrasi perkantoran			8.096.050,000		9.667.836,800		13.941.086,100		14.883.572,900		16.708.743,500		19.215.055,025					

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6					
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp (000.000)		
							TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Terbayarnya jasa air, listrik, dan sarana komunikasi (telepon)	1.20.1.20.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jalan Umum	Terbayarnya jasa air, listrik, dan sarana komunikasi (telepon)		1 th	8.096.050,000	1 th	9.667.836,800	1 th	13.941.086,100	1 th	14.883.572,900	1 th	16.708.743,500	1 th	19.215.055,025				
			1.20.1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya Sarana dan Prasarana Aparatur			2.283.650,000		6.138.783,150		4.340.963,700		4.510.577,700		3.854.914,000		5.184.904,200				
		Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional	1.20.1.20.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhiya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional				7 unit	2.390.000,000	1 unit	27.500,000	3 unit	643.000,000			3 unit	2.054.000.000,000				
		Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1.20.1.20.03.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhiya Kebutuhan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas				19 jenis	614.097,750	20 jenis	603.675,000										
		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1.20.1.20.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor		3 jenis	188.600,000	2 jenis	11.078,400												
		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1.20.1.20.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor		11 jenis	1.032.245,000	15 jenis	940.314,100	15 jenis	1.339.277,500	12 jenis	1.329.677,500	18 jenis	1.294.885,800	12 Jenis	776.148.200,000				
		Tersedianya Kebutuhan Meubeleur	1.20.1.20.03.02.010	Pengadaan Meubeleur	Terpenuhiya Kebutuhan Meubeleur		12 jenis	142.334,000	6 jenis	363.537,650	4 jenis	225.000,000	6 jenis	400.300,000	8 jenis	433.850,000	4 Jenis	200.000.000,000				
		Tersedianya bahan dan jasa pemeliharaan gedung kantor	1.20.1.20.03.02.022	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpenuhiya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor				1 th	685.000,000	1 th	1.188.811,200	1 th	1.005.400,200	1 th	1.213.478,200	12 bulan	1.232.055.000,000				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6					
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp (000.000)		
							TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)		
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Tersedianya jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.20.1.20.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi nya jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		1 th	920,471,000	1 th	1,046,755,000	1 th	711,700,000	1 th	902,200,000	1 th	762,700,000	12 bulan	777,700,000,000				
		Tersedianya suku cadang dan jasa service	1.20.1.20.03.02.026	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhi nya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor				1 th	88,000,000	1 th	245,000,000	1 th	230,000,000	1 th	160,000,000	12 bulan	145,000,000,000				
			1.20.1.20.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhi nya Peningkatan Disiplin Aparatur			154,764,000		499,044,000		602,500,000		1,626,575,000		740,000,000		610,000,000				
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1.20.1.20.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terpenuhi nya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		1 th	154,764,000	4 jenis	499,044,000	5 jenis	602,500,000	5 jenis	1,626,575,000	4 jenis	740,000,000	4 jenis	610,000,000,000				
2	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah		1.20.1.20.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Terpenuhi nya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan			654,397,700		1,477,776,060		882,486,600		1,085,700,800		1,423,268,900		1,600,021,200				
		Tersedianya Buku Pedoman Standarisasi Satuan Harga atas Pengadaan Barang	1.20.1.20.03.17.02	Penyusunan Standard Satuan Harga	Terwujudnya Standarisasi Satuan harga atas Pengadaan Barang		200 bk	35,000,000	200 bk	34,671,600	200 bk	48,671,600	200 bk	48,671,600	200 bk	56,500,000	200 bk	57,715,000,000				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6					
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp (000.000)		
							TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Terlaksananya tertib Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah pada SKPD dan Unit SKPD dilingkungan Pemerintah	1.20.1.20.03.17.16	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Buku Inventaris SKPD, KIB A, B,C,D,E,F. Buku Daftar Barang Milik Daerah		1 sistem	619,397,700	120 org	1.090,349,460	120 org	833,815,000	1 sistem	708,715,200	1 sistem	699,602,400	1 sistem	716,438,400,000				
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.20.1.20.03.17.18	Revaluasi/apraisal aset/Barang Daerah	Buku Inventaris Barang Milik Daerah				100%	352,755,000			6 bin	327,314,000	1 th	341,135,000	1 th	507,309,800,000				
		Terlaksananya pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)	1.20.1.20.03.17.58	Optimalisasi Sistem Informasi terhadap Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)										1 sistem	325,941,500	1 sistem	318,558,000,000				
			1.20.1.20.03.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan kegiatan :																	Bagian Humas Dan Protokol	
		Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah lainnya.	1.20.1.20.03.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya						100		105		110.250	100%	115.762	100%	121.550	100%			

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6					
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp (000.000)		
							TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya.	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya.	1.20.1.20.03.16.01	Dialog/ Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan						335.688		352.472		370.096	100%	388.600	100%	408.031	100%			
	Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.	Jumlah penerima kunjungan kerja pejabat negara.	1.20.1.20.03.16.13	Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen /Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri						78.412		82.332		86.449	100%	90.772	100%	95.310	100%			
	Terlaksananya sewa rumah jabatan/rumah dinas.	Jumlah sewa rumah jabatan/ rumah dinas	1.20.1.20.03.16.14	Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas						324		340.200		357.210	100%	375.071	100%	393.824	100%			
	Terlaksananya Penyediaan keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.	Terpenuhiya Penyediaan Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.	1.20.1.20.03.16.10	Penyediaan Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah						1.069.750		1.123.237		1.179.399	100%	1.238.369	100%	1.300.288	100%			

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6					
							2011		2012		2013		2014		2015		2016					
							TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)	TARGET	Rp (000.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Terpenuhinya pakaian khusus hari - hari tertentu.	Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.	1.20.1.20.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						619.397		650.367		682.885	100%	717.029	100%	752.881	100%			
			1.25.1.20.03.17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan ;																		
			1.25.1.20.03.17.02	Pembinaan dan Pengembangan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi										150	100%	99.9632	100%	107.4932	100%			

LOKASI

23

kabupaten
jembrana

LOKASI

23

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB	LO KASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga	Jumlah sosialisasi peraturan kerjasama dan fasilitasi penyusunan dokumen kerjasama		Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar pemerintah Kabupaten/Kota di luar Negeri dan Pihak Ketiga.						33.135		34.791		36.531		38.357		40.28				
		Jumlah kerjasama		Kegiatan pelembagaan kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota di luar negeri.						0		0		0		0		0				
5				Program Penataan Daerah otonomi Baru																		
	Terdatanya nama-nama unsur rupabumi	Jumlah kegiatan pelaksanaan penataan		kegiatan Pengembangan Data Informasi unsur Rupabumi		1 paket				34.65		36.38		38.2		40.11		42.12				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB	LO KASI	
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Terwujudnya Pelaksanaan penetapan Batas Wilayah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kel di fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah		Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah.		1 Desa/Kelurahan				750.001		787.75		826.88		868.22		911.6					
6				Program penyelesaian konflik pertanahan																			
	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi		Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan					50		52.5		55.13		57.88		60.78						
7			1.20.1.20.03.26	Program Penataan Peraturan Perundangan	Peningkatan penataan peraturan PerU-U																	Bagian Hukum Dan Ham	
	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan	Jumlah kegiatan pengharmonisan peraturan PerU-U	1.20.1.20.03.26.06	kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan(RA NHAM)	Output: Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh panitia RANHAM Kabupaten			4 Kegiatan	46	4 kegiatan	48.3	4 Kegiatan	50.715	4 Kegiatan	53.25	4 Kegiatan	55.91						

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB	LO KA SI		
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD					
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Jumlah ranperda yang diajukan ke DPRD	1.20.1.20.0 3.26.07	Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Output : Penyusunan Produk Hukum Daerah Outcome : Tersusunnya Produk Hukum				100%	265		278.25		292.16		306.77		322.1						
		Jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM	1.20.1.20.0 3.26.08	Kegiatan Penyelesaian dan pelayanan Bantuan Masalah masalah Hukum Dan HAM	Output : Pelaksanaan fasilitasi masalah masalah hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Jembrana. Outcome : Terfasilitasinya				3 Kasus	200	3 Kasus	210	3 Kasus	220.5	3 Kasus	231.53	3 Kasus	243.1						
		Jumlah himpunan produk hukum yang terdokumentasikan	1.20.1.20.0 3.26.09	Kegiatan Dokumentasi PeraturanPer undang undangan	Output : Mendokumentasikan peraturan perundang undangan Outcome : Memiliki Dokumentasi				3 Himpunan Produk Hukum	74	3 Himpunan Produk Hukum	77.7	3 Himpunan Produk Hukum	81.585	3 Himpunan Produk Hukum	85.664	3 Himpunan Produk Hukum	89.95						
		Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan Desa Sadar Hukum	1.20.1.20.0 3.26.10	Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum	Output : Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum OutCome : Tertaksananya				5 Kegiatan	32	5 Kegiatan	33.6	5 Kegiatan	35.28	5 Kegiatan	37.044	5 Kegiatan	38.9						

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LO KASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Jumlah penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	1.20.1.20.0 3.32.15	Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan	meningkatkan penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja aparatur	3 buku			3 buku	15	3 buku	15.75	3 buku	16.537	3 buku	17.364	3 buku	18.23				
		Jumlah Prosedur kerja SKPD yang disusun	1.20.1.20.0 3.32.31	Kegiatan Penyusunan Prosedur Kerja dan tata naskah dinas	Peningkatan Penyusunan Prosedur Kerja dan tata naskah dinas	5 SKPD			5 SKPD	65	5 SKPD	68.25	5 SKPD	71.662	5 SKPD	75.245	5 SKPD	79.01				
		Jumlah Laporan anjab dan analisis beban kerja yang disusun	1.20.1.20.0 3.32.32	Kegiatan Analisis Jaatan dan Analisis Beban Kerja	Peningkatan Analisis Jaatan dan Analisis Beban Kerja	2 Laporan			2 Laporan	302.9		318.05	2 Laporan	333.95	2 Laporan	350.64	2 Laporan	368.2				
	Adanya SOP, anjab, ABK, dan evaluasi organisasi dan Tupoksi serta pembinaan CPP dan CBAN	Jumlah Pelaksanaan penataan dan evaluasi organisasi dan dan Tupoksi	1.20.1.20.0 3.32.33	Kegiatan Penataan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Peningkatan evaluasi/ Penataan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	4 kali			4 kali	75	4 kali	78.75	4 kali	82.687	4 kali	86.821	4 kali	91.16				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANGUNG JAWAB	LO KASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Jumlah SKPD yang dibina	1.20.1.20.03.32.34	Kegiatan Pembinaan Citra Pelayanan Prima(CPP) dan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN)	Peningkatan Pembinaan Citra Pelayanan Prima(CPP) dan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN)	1 SKPD			1 SKPD	60	1 SKPD	63	1 SKPD	66.15	1 SKPD	69.458	1 SKPD	72.93				
10			1.20.1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	Bagian Umum	
		Jumlah penyediaan materai, perangko dan paket pengiriman	1.20.20.03.01.01	Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat	5.537 Pucuk Surat	5.537 Pucuk Surat	5.537 Pucuk Surat	50.000.000	5.537 Pucuk Surat	33.05	5.537 Pucuk Surat	34.702	5.537 Pucuk Surat	36.438	5.537 Pucuk Surat	38.26	5.537 Pucuk Surat	40.17				
		Jumlah penyediaan sewa peralatan dan perlengkapan kantor	1.20.1.20.03.01.03	Kegiatan Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	12 Bulan	100%	100%	1.592.100	100%	185.3	100%	194.57	100%	204.29	100%	214.51	100%	225.2				
		Jumlah penyediaan bahan pembersih dan jasa untuk kebersihan	1.20.1.20.03.01.08	Kegiatan Penyedia jasa kebersihan Kantor	35 Buah	12 Bulan	12 Bulan	1.469.507	12 Bulan	1.909.737	12 Bulan	2.005.224	12 Bulan	2.105.485	12 Bulan	2.210.759	12 Bulan	2.321.297				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LO KASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan	1.20.1.20.0 3.01.09	kegiatan Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor	23 Jenis	100%	100%	242.846.000	100%	173.846	100%	182.54	100%	191.67	100%	201.25	100%	211.3				
		Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1.20.1.20.0 3.01.10	Kegiatan Penyedia Alat tulis Kantor	66 Buah	12 Bulan	12 Bulan	138.766.600	12 Bulan	144.755	12 Bulan	151.99	12 Bulan	159.59	12 Bulan	167.57	12 Bulan	176				
		Jumlah penyediaan barang cetak dan fotocopy	1.20.1.20.0 3.01.11	Kegiatan Penyedia barang cetakan dan pengadaan.	49 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	276.569.000	12 Bulan	295.057	12 Bulan	309.81	12 Bulan	325.3	12 Bulan	341.57	12 Bulan	358.6				
		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.20.1.20.0 3.01.13	Kegiatan Penyedia Peralatan dan perlengkapan Kantor .	24 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	206.575.000	12 Bulan	219.975	12 Bulan	230.97	12 Bulan	242.52	12 Bulan	254.65	12 Bulan	267.4				
		Jumlah penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga	1.20.1.20.0 3.01.14	Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	4.090.000	8 Jenis	54.09	8 Jenis	56.795	8 Jenis	59.634	8 Jenis	62.616	8 Jenis	65.75				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD					
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	Meningkatnya koordinasi yang mantap	Jumlah pelaksanaan pelayanan terhadap kunjungan tamu-tamu daerah	1.20.20.03.33.01	Pelayanan kunjungan tamu-tamu daerah	12 Bulan	12 Bulan			100%	140.75	80%	147.79	80%	155.18	80%	162.94	80%	171.1						
13			1.20.1.20.03.31	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan:																				
	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi dan jasa lainnya	1.20.1.20.03.01.19	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga administrasi	12 Bulan	100%			100%	189.546	100%	199.02	100%	208.97	100%	219.42	100%	230.4						
		Jumlah pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur	1.20.1.20.03.31.11	Peningkatan dan pelatihan peningkatan kompetensi aparatur	12 Bulan	100%			100%	250	12 Bulan	262.5	12 Bulan	275.63	12 Bulan	289.41	12 Bulan	303.9						
II																					Asisten Ekbang Sos			

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1			1.17.1.20.0 3.15	Program pembangunan nilai budaya																	Bagian Ekbang Sos Bud	
	Terlaksananya kewajiban Pemkab Jembrana dalam mengatur upacara penganyar ke pura-pura yang didalam maupun diluar kabupaten.	Peningkatan pelaksanaan upacara penganyar	1.17.1.20.0 3.15.01.5.2	Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta.	Jumlah Pura yang dilaksanakan upacara penganyar	100%			31pura	777,00	31pura	815,85	31pura	#####	31pura	#####	31pura	####	31pura	#####		
2	Terlaksananya pengiriman sulinggih, Pemangku, Tukang Banten serta Calon Instruktur Pasraman untuk mengikuti pelatihan	peningkatan pengiriman sulinggih, Pemangku, Tukang Banten serta Calon Instruktur Pasraman untuk mengikuti pelatihan	1.17.1.20.0 3.15.04.5.2 2	2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Sulinggih, Pemangku, Tukang Banten serta Calon Instruktur Pasraman yang dikirim untuk mengikuti pelatihan.				25orang	21,525	25orang	#####	25orang	#####	25orang	#####	25orang	####	25orang	#####		

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			1.06.1.20.03.17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						777		815.85		856.64		899.48		944.4					

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bansos pada bidang Ekonomi, Pembangunan serta Sosial Budaya di Kabupaten Jembrana	Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bansos	1.061.20.03.17.31.5.2.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Bantuan Pemkab dan Pengelolaan Keuangan Daerah lainnya;	Jumlah Tim pemantauan dan evaluasi; Ekonomi, Pembangunan serta Sosial Budaya di Kabupaten Jembrana				4Team	112,438	4Tim	118,06	4Tim	#####	4Tim	#####	4Tim	####					
2	Terbentuknya Perda APBD	Terwujudnya Perda APBD		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Output: Perda tentang APBD Kabupaten Outcome: Terpenuhinya Perda tentang			#####		#####		#####		#####		#####		#####				Bag. Keuangan	
	Terbentuknya Pebup Penjabaran APBD	Terwujudnya Pebup Penjabaran APBD		Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Output: Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Outcome: Terpenuhinya Peraturan Kepala			#####		#####		#####		#####		#####		#####					

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Terbentuknya Perda Perubahan APBD	Terwujudnya Perda Perubahan APBD		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Output: Perda tentang Perubahan APBD Outcome: Terpenuhinya Perda tentang Perubahan APBD			#####		#####		#####		#####		#####		#####				
	Terbentuknya Perbup Penjabaran Perubahan APBD	Terbentuknya Perbup Penjabaran Perubahan APBD		Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Output: Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Outcome: Terpenuhinya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD			#####		#####		#####		#####		#####		#####				
	Terbentuknya Perda Pertanggungjawaban APBD	Terwujudnya Perda Pertanggungjawaban APBD		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	Output: Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			#####		#####		#####		#####		#####		#####				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB	LO KASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Outcome: Tercapainya Sistem Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel																	
	Terwujudnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD	Terbentuknya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD		Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD	Output: Terpeliharanya Jaringan Sistem di masing-masing SKPD Outcome: Terciptanya Sistem Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			#####		#####		#####		#####		#####		#####		####		

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB	LO KASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan Daerah	Terciptanya Penatausahaan Keuangan Daerah		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Output: Meningkatnya Pemahaman Bendaharawan dan Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome: Meningkatnya Kemampuan Bendaharawan dan Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah			#####		#####		#####		#####		#####		#####				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Terbentuknya Konsolidasi Prognosis Realisasi Anggaran	Terwujudnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Output: Terkonsolidasinya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran masing-masing SKPD Outcome: Tercapainya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Semesteran Pemerintah Kabupaten Jembrana			#####		91.590		#####		#####		#####		#####					
	Terbayarnya Gaji PNSD	Terkelolanya Pembayaran Gaji PNSD		Pengelolaan Gaji PNSD	Output: Meningkatnya Pemahaman Penganggaran dan Pengelolaan Gaji PNSD			0.000		76.378		#####		#####		#####		#####					

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Outcome: Terpenuhinya Ketersediaan Pendukung Dokumen APBD di bidang Pengelolaan Gaji																	
	Terbentuknya Pelembagaan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terwujudnya Perencanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah		Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Output: Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Outcome: Terpenuhinya Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah			0.000		75.000		0.000		0.000		0.000		#####				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4			1.20.1.20.0 3.01	Program Pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :																		Bagian Perlengkapan	
	Terpenuhinya pemeliharaan JPU	Terwujudnya PJU yang berfungsi dengan baik	1.20.1.20.0 3.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa air, listrik dan saran komunikasi	94,41 %			1 th	7.624.260	1 th	8.005.473	1 th	8.826.034	1 th	8.826.034	1 th	9.267.335					
	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor	1.20.1.20.0 3.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, dengan kegiatan :																			
	Terpenuhinya pemenuhan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pemenuhan kendaraan dinas/operasional	1.20.1.20.0 3.01.05	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	peningkatan pemenuhan kendaraan dinas/operasional				6 unit	1,055	5 unit	1,108	5 unit	1,163	5 unit	1,221	5 unit	1,282					
	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas	tersedianya perlengkapan rumah jabatan	1.20.1.20.0 3.01.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah jabatan/dinas				19 jenis	618,040	1 th	#####	1 th	#####	1 th	#####	1 th						

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Terepenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Terwujudnya pemenuhan perlengkapan Gedung Kantor	1.20.1.20.03.01.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor.					18.171		19.079		21.035		21.035		22.09				
	Terpenuhinya kebutuhan peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya pemenuhan peralatan Gedung Kantor	1.20.1.20.03.01.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor.					578.728		607.67		638.1		669.95		703.4				
	Terpenuhinya kebutuhan meubeler	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan meubeler	1.20.1.20.03.01.010	Pengadaan meubeler	Terpenuhinya kebutuhan meubeler.					329.169		345.63		381.05		381.05		400.1				
	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional	1.20.1.20.03.01.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional.					737.755		774.64		854.04		854.04		896.7				
	Terpenuhinya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1.20.1.20.03.01.024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.					545		572.25		630.91		630.91		662.5				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Terpenuhinya pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1.20.1.20.0 3.01.026	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor.					88		92.4		102.87		101.87		107					
	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terwujudnya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya.	1.20.1.20.0 3.03	Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan:	Terpenuhinya peningkatan disiplin Aparatur.																		
	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terwujudnya Pakaian dinas beserta kelengkapannya.	1.20.1.20.0 3.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian Dinas beserta kelengkapannya.				267.2		280.56		309.32		309.32		324.8						
			1.20.1.20.0 3.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terpenuhinya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan.																		
	Terpenuhinya pedoman Standarisasi Harga atas Pengadaan barang.	Terwujudnya Buku Pedoman Standarisasi harga.	1.20.1.20.0 3.17.02	Penyusunan standardisasi satuan harga	Terwujudnya standarisasi satuan harga atas pengadaan barang.				34.671		36.404		40.136		40.136		42.14						

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Terpenuhinya Sistem/Managemen Aset/ barang Daerah.	Terwujudnya Sistem/ Managemen Aset/Barang Daerah.	1.20.1.20.0 3.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Buku Inventaris SKPD, KIB A,B,C,D,E,F. Buku daftar barang milik daerah.					1.090.349		1.144.866		1.262.215		1.262.215		1.325.326					
	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya	Terwujudnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya.		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan kegiatan :																	Bagian Humas Dan Protokol		

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB	LO KASI	
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah lainnya.	Terwujudnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya.		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya						100		105		115.76		115.76		121.6					
	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya.	Terwujudnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya.		Dialog/ Audensi dengan Tokoh tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Masyarakat						335.688		352.47		388.6		388.6		408					
	Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.	Terpenuhinya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara.		Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri						78.412		82.332		90.772		90.772		95.31					

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Terlaksananya sewa rumah jabatan/rumah dinas.	Terpenuhinya sewa rumah jabatan / rumah dinas		Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas						324		340.2		357.21		375.07		393.8				
	Terlaksananya Penyediaan keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.	Terpenuhinya Penyediaan Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.		Penyediaan Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah					1.069.750		1.123.237		1.179.399		1.238.369		1.300.288					
	Terlaksananya Peningkatan kapasitas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Peningkatan kapasitas kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.		Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					55		57.75		60.637		63.669		66.85					
	Terlaksananya Pemeliharaan kesehatan kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.	Terpenuhinya pemeliharaan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah.		Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah					32		33.6		35.28		37.044		38.9					

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. Dalam Juta)														UNT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Terlaksananya kerjasama informasi dan media masa.	Terpenuhinya kerjasama informasi dan media masa		Program Kerjasama informasi dan media masa, dengan kegiatan																		
	Terlaksananya kerjasama informasi dan media masa.	Terpenuhinya kerjasama informasi dan media masa		Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan						564.348		592.57		622.19		653.3		686				
	Terlaksananya pakaian kerja lapangan.	Terpenuhinya pakaian kerja lapangan.		Program Peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan :																		
	Terlaksananya pakaian kerja lapangan.	Terpenuhinya pakaian kerja lapangan.		Pengadaan pakaian lapangan						14		14.7		15.435		16.207		17.02				
	Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu.	Terwujudnya pakaian khusus hari-hari tertentu.		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						619.397		650.37		682.89		717.03		752.9				

